KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

	RIAN KEUANGAN RI T JENDERAL PAJAK	H.1 NOMOR					H.4 X Final H.5 Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG								
A.1 NPWP : 7 2 5 1 5 5 2 6 1 5 2 5 0 0 0								
A.2 NIK :								
A.3 Nama : PRIYANTO								
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG								
MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3		B.4	B.5	B.6	B.7	
1	21-402-01	8.091.400		8.091.400	0	5	404.570	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal Z 5 dd D 2 mm Z 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :								
	: ndatangan :	RUMAH SAKIT 2 6 dd	0 1 mm nenyatakan baara elektronik.	RAH ATMA HUSADA MAHAK 2 0 2 2 yyyy ahwa bukti Pemotongan/Pemungui	tan Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	

R3L63LBS